

**EFEKTIVITAS REGULASI DAN PELAKSANAAN  
PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN  
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Stasiun PSDKP Pontianak)**

Oleh:  
**SUMONO DARWINTO, S.Pi**  
**NPM. A2021141003**

**Pembimbing I : Dr. Marcus Lukman, S.H.,M.H.**  
**Pembimbing II: MAWARDI, SH., M.Hum**

**ABSTRACT**

This thesis discusses issues Regulatory Effectiveness and Implementation of Fisheries Resources Monitoring (Study on Technical Implementation Unit PSDKP station Pontianak). From the results of research using normative legal research methods, we concluded that: 1. Assessed from the perspective of regulation, regulatory oversight of fishery resources in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries can be said is quite effective because it was based on a constitutional basis NRI 1945 Constitution and conventions of international law related to. As a property control, surveillance of fishery resources is done through law enforcement approach (surveillance), which is integrated with the system dilakukan Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS). At the concept level, normatifisasi and supervision activities of fishery resources daam formulated to four (4) main dimensions, namely: supervision before engaging in fishing activities (before fishing); supervision during fishing activities (while fishing); control when landing fish catches (during landing); and Supervision after landing catches (post landing). 2. The scope of monitoring of Fisheries Resources in the region of Technical Implementation Unit Pontianak stations include: Supervision of Fishing Vessels; Regional Monitoring and Line Fishing; Control of Fishing Equipment; and Monitoring Fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone. 3. Constraints Dominant Implementation Monitoring of Fisheries in the region of Pontianak PSDKP stations include: The limited number of supervisory personnel; Data integration system is not integrated; and limited funds and operational time. 4. Improving Future Fisheries Monitoring can be done by: Improving facilities, infrastructure, human resources, and financial resources, supervision in the fishing sector by fisheries inspectors who are under the auspices of the Directorate General of Marine Resources and Fisheries Ministry of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia; Improving coordination with institutions / bodies / agencies; Cooperate with other countries (international supervision). For overseas cooperation; and Conduct regulation fisheries surveillance more effective in the future. Further recommended to the front so that the law firm and organization in the scope of the ministry of maritime affairs and fisheries, is expected to be more pro-actively implement the task of coordinating and facilitating the preparation of legislation with pihak-related parties in the executive and legislative environment. Efforts must be taken so that legislation can be run in accordance with the provisions of the legislation is to create a program, set a target completion, to test the public (before, after,

and during the process), and involve others if these regulations have an impact on society.

**Keyword : Effectiveness, regulation, supervision, Law Enforcement**

### **ABSTRAK**

Tesis ini membahas masalah Efektivitas Regulasi dan Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Stasiun PSDKP Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Dikaji dari perspektif pengaturannya, regulasi pengawasan sumber daya perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dikatakan sudah cukup efektif karena sudah berbasis pada landasan konstitusional UUD NRI 1945 dan konvensi-konvensi hukum internasional yang berkaitan. Sebagai pengawasan property, maka pengawasan sumberdaya perikanan dilakukan melalui pendekatan **penegakan hukum (surveillance)**, yang dilkukan terintegrasi dengan sistem **Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS)**. Pada tataran konsep, normatifisasi dan kegiatannya pengawasan sumberdaya perikanan diformulasikan ke daam 4 (empat) dimensi utama, yaitu : pengawasan sebelum melakukan penangkapan ikan (*before fishing*); pengawasan selama melakukan penangkapan ikan (*while fishing*) ; pengawasan ketika melakukan pendaratan tangkapan ikan (*during landing*); dan Pengawasan setelah pendaratan tangkapan ikan (*post landing*). 2. Lingkup pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pontianak meliputi: Pengawasan Terhadap Kapal Perikanan; Pengawasan Wilayah dan Jalur Penangkapan Ikan;Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan; dan Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 3. Kendala Dominan Pelaksanaan Pengawasan Perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak meliputi: Keterbatasan jumlah personil pengawas; Sistem integrasi data belum terintegrasi; dan Keterbatasan dana dan waktu operasional. 4. Upaya Peningkatan Pengawasan Perikanan Ke Depan dapat dilakukan dengan cara : Meningkatkan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan, pengawasan di sektor penangkapan ikan oleh pengawas perikanan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; Meningkatkan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi terkait; Melakukan kerja sama dengan negara lain (pengawasan internasional). Untuk kerja sama luar negeri; dan Melakukan regulasi pengawasan perikanan yang lebih efektif ke depan. Selanjutnya direkomendasikan ke depan agar biro hukum dan organisasi di lingkup kementerian kelautan dan perikanan, diharapkan dapat lebih pro aktif melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dengan pihak-pihak terkait di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Upaya yang harus ditempuh agar peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan adalah dengan membuat program legislasi, mengatur target penyelesaian, melakukan uji publik (sebelum, sesudah, dan selama proses) dan melibatkan pihak lain jika peraturan tersebut berdampak pada masyarakat.

**Kata Kunci : Efektivitas, Regulasi, pengawasan, Penegakan Hukum**

## Latar Belakang

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Tahun 2015-2019 telah dirumuskan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan. Visi tersebut menyatakan: **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**. Kemudian dirumuskan Misi dan Tujuan Strategisnya sebagai berikut:

### Misi

- 1. Kedaulatan (*Sovereignty*)** : mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2. Keberlanjutan (*Sustainability*)**: mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- 3. Kesejahteraan (*Prosperity*)**: mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

### Tujuan:

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

#### 1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

- a. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b. Mengembangkan 3ogist perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

#### 2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- b. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya; Meningkatkan daya saing dan 3ogist 3ogistic hasil kelautan dan perikanan;
- c. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.

#### 2. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

- a. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Selanjutnya visi, misi dan tujuan tersebut dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan serta secara eksplisit diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan setiap direktorat jenderal yang berada di lingkungan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP)** berperan dalam melaksanakan **pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)** dan **penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan**, guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan ke dalam Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 sebagai berikut:

**Visi** : *“Perairan Indonesia bebas illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”*.

#### **Misi**

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 2) Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

#### **a. Tujuan**

Sebagai penjabaran visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal PSDKP kedepan yaitu:

- 1) Terwujudnya kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 2) Terlindunginya sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) Terlaksananya tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif.

#### **b. Sasaran Strategis.**

Sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2015-2019 melalui

pendekatan *balanced scorecard* (BSC) kedalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pontianak yang berada di bawah struktur organisasi dan bertanggung jawab langsung kepada Ditjen. PSDKP, adalah melaksanakan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta evaluasi terhadap penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya, termasuk Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pontianak.

Perlu ditegaskan, bahwa selama tahun 2010 – 2014, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pontianak, masih marak terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, baik bersifat administratif maupun tindak pidana perikanan, seperti : tidak memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI.

### **Permasalahan:**

Upaya yang seharusnya dilakukan untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan Sumber Daya Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan ke depan?

### **Pembahasan**

Pada tahun 2015, Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak melakukan pemantauan kapal perikanan dengan RMC (Regional Monitoring Center) dan diketahui sebanyak 478 kapal perikanan (52,76%) melakukan pelanggaran operasional kapal perikanan. Jumlah tersebut dihimpun dari 9 Satker dan 2 Pos di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak, yaitu Satker PSDKP Natuna, Satker PSDKP Tarempa, Satker PSDKP Tanjung Pinang, Satker PSDKP Kijang, Satker PSDKP Batam, Satker PSDKP Moro, Satker PSDKP Tanjung Balai Karimun, Satker PSDKP Sungai Liat, Satker PSDKP Pemangkat, Pos PSDKP Sungai Rengas, dan Pos PSDKP Jakabaring-Palembang. Dimana sebanyak 27 kapal (2,98%) diduga melanggar daerah penangkapan ikan dan/atau pelabuhan pangkalan sebagaimana tertulis dalam

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Sebelumnya pada tahun 2010 - 2014, telah ditangkap dan diproses ke Pengadilan Perikanan sebanyak 130 kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan NRI dalam wilayah kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak yang terdiri dari 118 Kapal Ikan Asing (KIA) dan 12 Kapal Ikan Indonesia (KII). Hal ini menunjukkan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak,

Selain peningkatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan, pengawasan di sektor penangkapan ikan oleh pengawas perikanan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pengawasan penangkapan ikan juga dilakukan oleh beberapa instansi terkait seperti Badan Keamanan Laut (bakamla) yang dahulunya bernama bakorkamla, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut (TNI-AL).

Kerja sama antar lembaga di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/atau organisasi yang memiliki kekuatan hukum, guna mencapai suatu keserasian atau kesepakatan kerja sama yang memberikan hasil yang baik untuk semua pihak.

Efektivitas kerja sama atau koordinasi antara ditjen PSDKP dengan instansi lainnya seperti bakamla, TNI AL, Polri sejauh ini telah berjalan sangat baik. Ditjen PSDKP, TNI AL dan Polri juga memiliki forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan. Selain itu, khusus pengawasan di laut, Ditjen PSDKP, TNI AL dan Polri memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama tentang penanganan tindak pidana perikanan.

Kerja sama yang terjalin antar instansi atau lembaga ini merupakan suatu wujud keseriusan seluruh stake holders untuk menjaga dan memelihara serta menegakkan peraturan perundang-undangan. Mengingat semboyan Negara Indonesia yaitu “Bhineka Tunggal Ika”, yang dapat diartikan bahwa walaupun instansi yang bekerja sama ini berbeda dalam struktur maupun organisasi, namun mereka memiliki satu tujuan yang sama yaitu menegakkan hukum. Hal ini juga merupakan salah satu amanat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang

tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Selain bentuk kerja sama dengan instansi lain (pengawasan nasional), faktor pendukung lainnya adalah kerja sama dengan negara lain (pengawasan internasional). Untuk kerja sama luar negeri, itu ada kerja sama regional (di kawasan) dan kerja sama bilateral dengan negara tertentu. Untuk kerja sama regional, kita bersama 11 negara (10 negara asean+Australia) tergabung dalam regional plan of action to promote responsible fishery including to combat IUU Fishing. Dalam regional plan of action ini, digalang kerja sama denga 11 negara ini untuk melakukan penangkapan ikan yang bertanggungjawab dan memberantas IUU fishing.

Pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan seperti penanggulangi *IUU Fishing* disadari oleh Indonesia dan negara lain tidaklah mudah sehingga kerja sama dalam pengawasan pelaksanaan penangkapan ikan menjadi sangat penting. Dengan Australia misalnya,pada tanggal 17 Juli 2009, Ditjen PSDKP telah menandatangani pembentukan *Indonesia - -Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*. IAFSF ini merupakan kerangka *Working Group on Fisheries*, yang beberapa kegiatannya berupa operasi pengawasan terkoordinasi (*coordinated patrol*), pertukaran data dan informasi, dan penguatan kapasitas (*capacity building*) kelembagaan dalam konteks penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perbatasan kedua negara (yang merupakan zona ekonomi eksklusif).

Selanjutnya, ketersediaan perangkat hukum yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung kegiatan pengawasan penangkapan ikan yang efektif ke masa depan. Perangkat hukum yang memadai berarti mereka yang mengerti dan memahami dengan baik tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengawasan penangkapan ikan. Selain memahami tugas, perangkat hukum tersebut juga harus berani menjalankan kewenangannya tanpa mau diintervensi dengan pihak lain yang beritikad buruk, dan selalu berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan yang sejatinya merupakan manifestasi bagi kemajuan Indonesia ke masa depan.

Aparat penegak hukum seperti pengawas perikanan, TNI AL maupun Polri sebagai aparat yang telah mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan pada bidang penangkapan ikan ini, seyogyanya tidak boleh puas karena disadari atau tidak, situasi dan kondisi terus berkembang sehingga tidak tertutup

kemungkinan kedepannya aparat hukum ini dapat saja menjadi boomerang bagi penegakan hukum itu sendiri. Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan misalnya pada proses penangkapan ikan, aparat penegak hukum tentunya harus memiliki landasan atau pedoman dalam setiap tindakan. Landasan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang telah memiliki kekuatan hukum dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Di lingkup kementerian kelautan dan perikanan, biro hukum dan organisasi mempunyai tugas yang salah satunya adalah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan. Upaya yang harus ditempuh agar peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan adalah dengan membuat program legislasi, mengatur target penyelesaian, melakukan uji publik (sebelum, sesudah, dan selama proses) dan melibatkan pihak lain jika peraturan tersebut berdampak pada masyarakat.

### **Kesimpulan**

Efektivitas regulasi dan dimensi pengawasan sumber daya perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- a. Dikaji dari perspektif pengaturannya, regulasi pengawasan sumber daya perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dikatakan sudah cukup efektif karena sudah berbasis pada landasan konstitusional UUD NRI 1945 dan konvensi-konvensi hukum internasional yang berkaitan. Sebagai pengawasan property, maka pengawasan sumberdaya perikanan dilakukan melalui pendekatan **penegakan hukum (*surveillance*)**, yang dilakukan terintegrasi dengan sistem ***Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS)***.
- b. Pada tataran konsep, normatifisasi dan kegiatannya pengawasan sumberdaya perikanan diformulasikan ke dalam 4 (empat) dimensi utama, yaitu : pengawasan sebelum melakukan penangkapan ikan (*before fishing*); pengawasan selama melakukan penangkapan ikan (*while fishing*) ; pengawasan ketika melakukan pendaratan tangkapan ikan (*during landing*); dan Pengawasan setelah pendaratan tangkapan ikan (*post landing*).
1. Lingkup pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pontianak meliputi:
  - a. Pengawasan Terhadap Kapal Perikanan;
  - b. Pengawasan Wilayah dan Jalur Penangkapan Ikan;



- c. Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan;
  - d. Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Kendala Dominan Pelaksanaan Pengawasan Perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak meliputi:
- a. Keterbatasan jumlah personil pengawas;
  - b. Sistem integrasi data belum terintegrasi;
  - c. Keterbatasan dana dan waktu operasional;
3. Upaya Peningkatan Pengawasan Perikanan Ke Depan dapat dilakukan dengan cara :
- a. Meningkatkan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan, pengawasan di sektor penangkapan ikan oleh pengawas perikanan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi terkait;
  - c. Melakukan kerja sama dengan negara lain (pengawasan internasional). Untuk kerja sama luar negeri;
  - d. Melakukan regulasi pengawasan perikanan yang lebih efektif ke depan.

## Daftar Pustaka

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Bagir Manan, *Good Governance* hindarkan rakyat dari tindakan negara yang merugikan, Makalah, Bandung, 1999.
- Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Farida Puspitasari, Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia, Artikel, Jakarta, 2008.
- Lawrence W. Friedman, *American Law An Introduction, Second Edition*, diterjemahkan Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang baik) bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik), Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Press, 2005.
- Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang baik) bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik), Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.